

PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA LAMAJANG KABUPATEN BANDUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT LOKAL

Taufiq Hidayat¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Bandung
taufiqhi7912@gmail.com

Arisman Muchtar²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Bandung
arisman.m168@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to describing institutional capacity and role in the Lamajang Tourism Village development program in Bandung Regency and its impact on the local community's economy. The approach used in this study is a qualitative approach with a case study technique. The cases that were used as study subjects were cases of special groups or communities in tourism development in Lamajang village, including the Lamajang Tourism Village Management Board, Tourism Awareness Group (POKDARWIS) and Karang Taruna as local institutions formed in the tourism village program in Lamajang village, Pangalengan district, Bandung district. An overview of institutional capacities and roles in the development of tourist villages will be described through individual and organizational capacities as well as the four roles carried out by village institutions in tourism village development activities in Lamajang village, namely facilitating, mediating, conveying information, and improving the community's economy in a sustainable manner. The results showed that the Lamajang Tourism Village already had the capacity, both organizational capacity and individual capacity, but tourism development had not significantly impacted the local community's economy because of the condition of the tourism village which was still in the pilot stage. The obstacle is due to the lack of synergy between the tourism village management body and village institutions under the village government such as the Family Welfare Development Group, Forest Village Community Institutions and this tourism activity also has not fully involved the community.

Keywords: *tourist village, pokdarwis, role, community economy*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan kapasitas dan peran kelembagaan dalam program pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Adapun kasus yang dijadikan subyek studi adalah kasus Kelompok atau komunitas khusus dalam pengembangan pariwisata di desa Lamajang antara lain Badan Pengelola Desa Wisata Lamajang, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Karang Taruna sebagai institusi lokal yang dibentuk dalam program desa wisata di desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Gambaran mengenai kapasitas dan peranan kelembagaan dalam pengembangan desa wisata akan dideskripsikan melalui kapasitas individu dan organisasi serta empat peranan yang dilakukan kelembagaan desa dalam aktivitas pengembangan desa wisata di desa Lamajang, yaitu fasilitatif, mediasi, penyampai informasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Lamajang telah memiliki kapasitas baik kapasitas organisasi maupun kapasitas individu, namun pengembangan pariwisata secara signifikan belum membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat setempat hal tersebut karena kondisi desa wisata yang masih dalam tahap rintisan. Hal yang menjadi kendala adalah disebabkan kurangnya sinergitas antara badan pengelola desa wisata dengan lembaga-lembaga desa yang ada dibawah pemerintah desa seperti kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Masyarakat Desa Hutan serta kegiatan kepariwisataan ini juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.

Kata kunci: *desa wisata, pokdarwis, peran, perekonomian masyarakat*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mempunyai peran dan kontribusi penting bagi bangsa serta pembangunan ekonomi daerah atau lokal. Peningkatan kemajuan ekonomi serta kemakmuran telah membentuk pariwisata bagian mendasar dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan bahkan sudah menggerakkan jutaan orang mengenal alam dan budaya di belahan dunia lain. Salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal melalui desa wisata. Pengembangan pariwisata melalui desa wisata diharapkan dapat lebih menarik kunjungan wisatawan, memberikan dampak bagi masyarakat lokal serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata karena masyarakat lokal yang lebih mengerti mengenai desa wisata mereka.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Guna menunjang perkembangan pariwisata diperlukan kelompok-kelompok yang tumbuh dari, oleh dan untuk warga itu sendiri, yang peduli akan keberadaan dan pelestarian kekayaan alam dan budaya yang dimiliki warga. Untuk itu diperlukan sumber informasi yang memadai sebagai acuan dan pegangan dalam membentuk kelompok-kelompok yang dimaksud. Kelompok-kelompok yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memelihara, menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan budaya inilah yang disebut dengan Kelompok Sadar Wisata atau disingkat POKDARWIS.

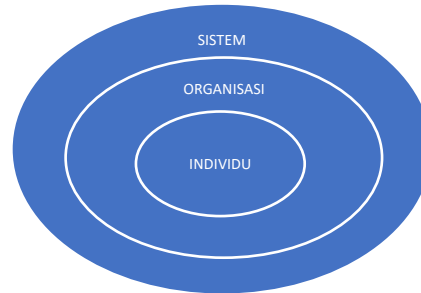
Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan lokal sebagai alternatif pengembangan pariwisata terkait dengan kampanye sadar wisata. Kelompok Sadar Wisata yang saat ini ada di Kabupaten Bandung setiap tahun terus bertambah, saat ini di Kabupaten Bandung telah terdapat 32 Pokdarwis yang tersebar di beberapa wilayah desa. Keberadaan kelembagaan POKDARWIS yang mana SK nya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung tujuannya adalah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pariwisata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong terwujudnya Sapta Pesona (keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, keramahtamahan dan kenangan), meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata secara keseluruhan.

Keberhasilan pengembangan suatu desa wisata tidak lepas dari peran kelembagaan lokal dalam mengelola desa wisata. Lembaga ini memiliki peran dalam mengatur sumberdaya, distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata, wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata. Penelitian ini akan mengkaji bagaimanakah peranan badan pengelola desa wisata sebagai institusi lokal dalam pengembangan desa wisata.

Menurut Inskeep (1991), dalam konteks pariwisata, kelembagaan adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata (Triambodo

& Damanik, 2015). Urgensi keberadaan kelembagaan dalam bidang pariwisata adalah kelembagaan dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata (Triambodo & Damanik, 2015).

Menurut Kapucu, Healy, dan Arslan (2011) kapasitas merupakan suatu sumberdaya, tingkat kepemimpinan, kemampuan atau keahlian masyarakat yang memadai, tingkatan tertentu pada kelembagaan (perubahan hal-hal baru yang bernilai baik). Kapasitas institusi atau kelembagaan dapat dilihat dari level-level kapasitas masyarakatnya yaitu tingkat sistem, tingkat organisasi, dan tingkat individu (UNDP, 1997) lebih jelas digambarkan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tingkat Kapasitas Kelembagaan
Sumber: (UNDP, 1997)

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan adalah salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata (Inskeep, 1991). Pada aspek kelembagaan, diperlukan kapasitas masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun individu sebagai pelaku utama dalam pengembangan desa wisata untuk pelaksanaan strategi dan program pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas masyarakat, peran Badan Pengelola Desa Wisata, POKDARWIS, dan Karang Taruna dalam kelembagaan lokal di Desa Lamajang Kabupaten Bandung dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap, memahami, dan menggambarkan realitas dan fenomena yang terjadi di lapangan. Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan pemeriksaan mendalam bukan digeneralisasi terhadap suatu keadaan atau fenomena yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.

Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai peran kelembagaan dalam pengembangan desa wisata Lamajang, pada tahap awal penelitian lebih terfokus pada studi literatur, perumusan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian serta menentukan pendekatan dan metode yang digunakan. Tahap ini berguna bagi penulis untuk mendapatkan *background knowledge* sebelum masuk ke tempat penelitian. Tahap selanjutnya untuk memperoleh informasi tentang desa wisata Lamajang dilakukan *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan para tokoh-tokoh penting pelaku kepariwisataan seperti pengelola homestay, pengelola café, pelaku umkm, pengelola daya tarik wisata dan aparat desa.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi wawancara, rekaman, serta pengamatan yang ditulis. Selanjutnya data tersebut dianalisis dalam kerangka pikir induktif agar konteks penelitian dapat dideskripsikan penentuan satuan sebagai bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Tahapan terakhir setelah data terkumpul adalah melakukan analisis informasi dari data yang didapatkan. Hasil analisis tersebut kemudian dinarasikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif dan didukung oleh skema, table, grafik serta foto sebagai output dari penelitian yang dilakukan. Bagian akhir dari tahapan ini adalah pembuatan kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Wisata Lamajang

Secara administratif Desa Lamajang terletak di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan. Batas wilayah Desa Lamajang adalah sebelah utara Desa Sukamaju, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulosari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikalong dan Tribaktimulya. Luas wilayah Desa Lamajang adalah 4016,091 Ha dengan ketinggian 900 – 1.200 mdp1, curah hujan rata-rata 1.000-2.500mm/tahun, suhu udara rata-rata 26 derajat hingga 30 derajat. Terdiri dari 5 dusun 23 RW dan 92 RT. Struktur pemanfaatan lahan terdiri dari 1.001 Ha untuk pertanian lahan kering, seluas 1.730 Ha untuk lahan perkebunan, lahan pemukiman seluas 2.006 Ha, lahan kolam seluas 4 hektar, dan seluas 214 Ha untuk fasilitas desa lainnya. Desa Wisata Lamajang memiliki berbagai potensi alam dan budaya yang dijadikan sebagai atraksi wisata. Potensi alam dan budaya yang ada di Desa Wisata Lamajang antara lain:

Rumah Adat Cikondang

Rumah adat Cikondang merupakan rumah adat yang dimiliki oleh Bapak Anom Samsa, berada di area seluas 3 hektar dan diperkirakan telah berusia 200 tahun. Menurut juru kunci sebuah peristiwa kebakaran besar yang terjadi sekitar tahun 1942 telah menghancurkan perkampungan adat Cikondang dan hanya menyisakan satu rumah yang sekarang dijadikan sebagai rumah adat penduduk sekitar.

Rumah adat Cikondang memiliki bentuk atap julang ngapak, konstruksi atap terdiri atas kuda-kuda dengan bahan kayu, gording dengan bambu, ditutup dengan atap bambu yang dibelah dua dengan teknik pemasangan tumpang tutup kemudian dilapisi ijuk. Di bawah atap terdapat langit-langit atau para yang difungsikan untuk menyimpan peralatan upacara ritual 15 Muharram. Di bawah para terdapat pago, yakni tempat menyimpan peralatan masak, yang umumnya peralatan tersebut dikeluarkan ketika diadakan upacara ritual 15 Muharram. Selain rumah adat, di sebelah utara berdiri leuit, yakni lumbung tempat menyimpan padi, di sebelah barat ada lisung untuk menumbuk padi menjadi beras. Di dekat lisung, di sebelah utara, dibangun bale paseban yang fungsinya sebagai tempat pertemuan.

Batu Eon

Batu Eon adalah salah satu daya tarik wisata yang dimiliki oleh Desa Lamajang. Batu Eon memiliki keistimewaan, yaitu tidak dapat dihancurkan oleh dinamit sekalipun. Mitos

tersebut di dapat dari warga setempat yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Batu itu berada di tengah-tengah kolam tando (reservoir) harian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cikalong. Batu itu menjadi monumen pendirian PLTA Cikalong yang dibangun pada abad ke-19.

Fajar Alam

Fajar alam merupakan salah satu daya tarik wisata di Desa Wisata Lamajang yang dapat dijadikan sebagai pilihan tepat untuk rekreasi keluarga. Udaranya yang sejuk dan pemandangan yang indah sangat cocok untuk kegiatan family gathering, berkemah dan kegiatan outdoor lainnya seperti flying fox dan tracking. Selain itu terdapat daya tarik wisata air berupa wisata arum jeram di sungai Cisangkuy, dengan panjang lintasan sekitar 6km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam dan 12km dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Selain wisata arum jeram wisatawan juga dapat beraktivitas lain seperti berenang.

Desa Wisata Lamajang memiliki beberapa potensi budaya yaitu karinding, seni tradisional beluk, beluk merupakan seni suara yang isinya berisi pepatah hidup namun ditembangkan menggunakan lagam suara pupuh namun bersahutan, ada satu orang yang ngilo atau menyuarakan seperti membaca dan beberapa orang ada yang nembang menyuarakan menggunakan lagam pupuh. Pencak silat di Desa Wisata Lamajang juga masih dilestarikan bahkan terdapat paguron yang diberi nama Himpunan Pencak Silat Indonesia Gajah Putih, Tapak Lodaya. Desa Wisata Lamajang juga memiliki produk kerajinan tangan hasil masyarakat pengrajin, produk dari kerajinan berupa bekong dan hiasan miniatur yang berbentuk perahu, vas bunga, bingkai foto, dan asbak yang terbuat dari kayu dan bambu. Juga terdapat beragam wisata kuliner seperti kolontong, rujak suro, rangining, rangining dan lain sebagainya.

Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata Lamajang

Dalam pengelolaan Desa Wisata Lamajang terdapat beberapa lembaga, namun yang utama adalah Badan Pengelola Desa Wisata Lamajang, dibawah lembaga ini terdapat lembaga-lembaga lain yaitu: Pokja Wisata, POKDARWIS, Pokja ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM termasuk Karang Taruna, dan Lembaga Adat. Peran Badan Pengelola Desa Wisata ini adalah menata dan mengelola asset-aset yang ada di desa lamajang. Pada saat ini yang akatif mengelola Desa Wisata Lamajang adalah POKDARWIS, POKDARWIS merupakan organisasi yang berfungsi mengelola daya Tarik wisata yang ada di Desa Wisata Lamajang. Organisasi ini berdiri pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor 556.42/Kep. Dispopar/2011 ditetapkan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai organisasi pengelola desa wisata.

Kapasitas kelembagaan adalah kemampuan organisasi dalam mengelola Desa Wisata Lamajang. Kapasitas organisasi dapat dilihat dari kepemimpinan dan koordinasi, kemitraan eksternal, kapasitas untuk mengembangkan atraksi wisata serta kapasitas untuk mempromosikan desa wisata.

Kepemimpinan dan Koordinasi

Pada organisasi Badan Pengelola Desa Wisata, bapak Dani berperan sebagai koordinator lapangan serta pemimpin bagi pengelolaan Desa Wisata Lamajang. Dani mulai mengelola Desa Wisata Lamajang pada tahun 2004. Tipe kepemimpinan dalam POKDARWIS Desa Wisata Lamajang merupakan tipe kepemimpinan tunggal dengan gaya kepemimpinan demokratis. Kepengurusan Badan Pengelolaan Desa Wisata ini dilakukan secara demokrasi melalui mekanisme pemilihan dilakukan oleh para tokoh desa bersama pemerintahan desa dan

para kader yang perhatian terhadap kepariwisataan, setelah ketua terpilih selanjutnya dilakukan pembentukan pengurus Badan Pengelola Desa Wisata.

Badan ini fungsi pokoknya yaitu meningkatkan atau mengangkat asset-aset yang ada di desa Lamajang seperti Rumah Adat Cikondang, Kolam Tando atau Batu Eon atau mencari potensi alam yang ada dan juga melakukan pemetaan sumber daya yang nantinya akan dikembangkan untuk dijadikan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan lokasi mana yang menjadi daerah adat dan baik untuk dikembangkan guna memberi manfaat kepada masyarakat atau tempat yang disakralkan oleh masyarakat adat yang kemungkinan berdampak tidak baik jika dikembangkan.

Koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain selama ini telah berjalan dengan baik yaitu dengan POKDARWIS karena sama-sama mengurus terkait kepariwisataan, sedangkan dengan pokja ibu-ibu PKK dan Karang Taruna belum terjalin dengan baik dikarenakan masih terdapat pandangan yang berbeda dari masing-masing lembaga terkait kepariwisataan serta masih adanya dikotomi antara kelompok kader dan pengelola desa wisata. Seharusnya ada kesinergisan antar lembaga yang ada jangan berjalan masing-masing. Sejauh ini masih banyak kendala terutama koordinasi dalam pengelolaan Desa Wisata Lamajang. Permasalahan ini memang belum menimbulkan konflik pada saat ini. Namun di kemudian hari akan menyebabkan Badan Pengelola Desa Wisata Lamajang tidak dapat berjalan secara optimal.

Kemitraan Eksternal

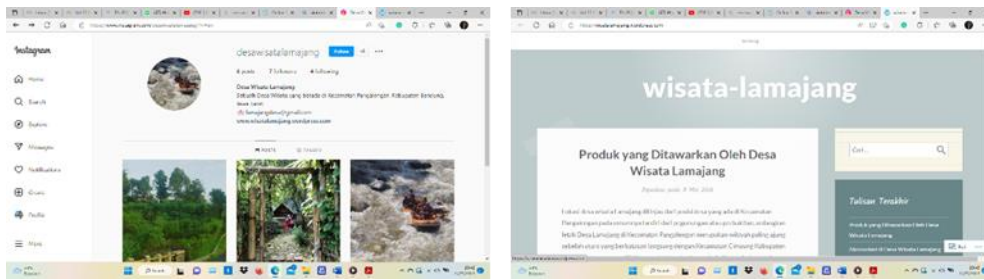
Pengelolaan Desa Wisata tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari desa wisata itu sendiri. Perlu adanya bantuan dari berbagai pihak di luar desa wisata untuk meningkatkan pendapatan desa wisata. Badan Pengelola Desa Wisata Lamajang memiliki kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal. Organisasi ini telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar Desa Wisata Lamajang seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung serta beberapa perguruan tinggi.

Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengelola Desa Wisata Lamajang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung berupa penguatan kapasitas SDM bagi pengelola desa Wisata dan masyarakat yang terlibat dalam kepariwisataan, bentuk pelatihan berupa program pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu Kerjasama dengan perguruan tinggi juga sudah terjalin dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pendampingan yang terkait dengan pengelolaan desa wisata serta pelayanan terhadap wisatawan seperti pelatihan *public speaking*, pemanduan wisata.

Pengembangkan Atraksi Wisata dan Promosi

POKDARWIS Desa Lamajang telah mengembangkan potensi wisata menjadi atraksi wisata guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dalam perkembangannya, pengelola Desa Wisata Lamajang sudah memiliki kapasitas yang baik untuk mengembangkan atraksi wisata dibuktikan dengan semakin berkembangnya atraksi Desa Wisata dari masing-masing dusun.

POKDARWIS Desa Lamajang memiliki kapasitas yang baik dalam hal promosi Desa Wisata Lamajang. Promosi Desa Wisata Lamajang dilakukan melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan blog (lihat gambar 2). Pemerintah desa juga melakukan kegiatan promosi dengan cara mempublikasikan Desa Wisata Lamajang melalui website pemerintah desa, serta adanya Festival Desa Wisata yang diadakan di Kabupaten Bandung.



Gambar 2. Media Promosi Desa Wisata Lamajang
Sumber: www.instagram.com/desawisatalamajang dan
<https://wisatalamajang.wordpress.com/>

Kapasitas Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Lamajang

Kapasitas masyarakat dalam untuk merintis pengembangan potensi wisata dapat diukur dari parameter masyarakat mengenali jenis-jenis potensi yang ada di desanya dan adanya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi atraksi wisata. Pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Lamajang antara lain anggota POKDARWIS, tokoh adat dan kesenian, pengelola homestay, karang taruna, pengurus PKK, pengelola souvenir atau cinderamata.

Kapasitas masyarakat dalam mengenali jenis-jenis potensi wisata di Desa Wisata Lamajang dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu masyarakat yang memahami seluruh potensi di Desa Wisata Lamajang baik itu potensi alam maupun budaya, dan yang kedua adalah masyarakat yang memahami beberapa potensi Desa Wisata Lamajang. Masyarakat yang memahami seluruh potensi alam maupun budaya di Desa Wisata Lamajang adalah anggota POKDARWIS Desa Lamajang. Sedangkan masyarakat yang memahami beberapa potensi Desa Wisata Lamajang yaitu pengelola homestay, pengelola cinderamata dan tokoh kesenian.

Kapasitas individu dalam mengembangkan potensi wisata menjadi atraksi wisata sesuai dengan kapasitas dan peran yang dimiliki individu. Sebagian besar anggota POKDARWIS Desa Lamajang belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan desa wisata pada saat bergabung dengan POKDARWIS. Untuk meningkatkan kapasitas anggota POKDARWIS Desa Lamajang, mereka mendapatkan pelatihan yang diadakan baik oleh POKDARWIS maupun pendampingan oleh perguruan tinggi.

Masyarakat Desa Wisata Lamajang selain anggota POKDARWIS juga mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya. Pelatihan yang dijalani sesuai dengan peran yang dimiliki. Untuk pengelola homestay, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan pengarahan mengenai homestay. Untuk pengelola cinderamata dan pengurus PKK diadakan pelatihan mengenai pemberdayaan masyarakat dan kegiatan studi banding ke desa wisata yang ada di Yogyakarta.

Kapasitas individu mengenai pengetahuan dan pemahaman konsep desa wisata kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat mengenai konsep desa wisata terpadu terbatas hanya menyebutkan berbagai potensi wisata namun belum dapat mengaplikasikan konsep desa wisata terpadu di dalam pengembangan Desa Wisata Lamajang. Sehingga saat ini pengembangan difokuskan pada wisata alam dan wisata budaya. Pengembangan Desa Wisata Lamajang belum mengintegrasikan berbagai jenis wisata dan potensi-potensi yang ada di desa seperti homestay, cinderamata atau souvenir.

Pengelolaan atraksi wisata berkaitan dengan proses yang terencana dan teorganisasi sehingga menghasilkan serangkaian tindakan yang berkesinambungan. Kapasitas individu dalam mengelola atraksi wisata dilihat dari tiga indikator yaitu kemampuan mengelola paket wisata, kemampuan mengelola sarana penunjang desa wisata serta kemampuan merawat objek wisata.

Dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Lamajang, kemampuan pengelola dapat dilihat dari pengelolaan paket wisata. Pengelolaan paket wisata ini dimulai dari pengelola menawarkan paket wisata kepada wisatawan sampai dengan kegiatan evaluasi. Selain pengelolaan paket wisata, kapasitas pengelola juga dapat diukur dari kondisi sarana penunjang desa wisata. Sarana Desa Wisata Lamajang terdiri dari sekretariat, kondisi objek wisata, serta kondisi WC umum. Kapasitas pengelola dalam mengelola sarana desa wisata dinilai kurang dilihat dari minimnya sarana WC umum serta minimnya informasi mengenai peta wisata.

Indikator kapasitas pengelola dalam mengelola atraksi wisata dilihat juga dari kemampuan pengelola untuk merawat objek wisata atau biasa disebut dengan *maintenance*. Desa Wisata Lamajang merupakan desa wisata yang lebih banyak mengandalkan wisata *adventure* sehingga memiliki objek wisata yang perawatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kang Dani adalah salah seorang pengurus POKDARWIS Desa Lamajang, yang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam aktivitas *outbond*, *flying fox*, dan kegiatan lainnya. Kapasitas anggota POKDARWIS Desa Lamajang dalam melakukan perawatan pada objek wisata dapat dikatakan baik. Anggota dapat memahami bagaimana mekanisme perawatan objek wisata. Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa Wisata Lamajang telah menerima beberapa program peningkatan kapasitas kelembagaan yaitu pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola Desa Wisata Lamajang baik kapasitas secara individu maupun secara organisasi. Berikut beberapa program yang pernah dilaksanakan oleh Desa Wisata Lamajang.

- a. Pembinaan mengenai *homestay*
- b. Pengemasan produk wisata
- c. Pelatihan *digital marketing*
- d. Pelatihan *outbound*
- e. Pelatihan pemanduan wisata
- f. Pelatihan *public speaking*
- g. Pengembangan kuliner

Peran Lembaga Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata

Dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lamajang, lembaga desa memegang peranan yang sangat sentral. Lembaga Desa yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Lamajang diantaranya:

- a. Pemerintah Desa

Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata. Sejalan hal tersebut, Pemerintah desa sebagai salah satu lembaga desa di Desa Wisata Lamajang berperan dalam pengaturan sumber daya sebagai pengelola wisata yaitu dengan membentuk badan pengelola desa wisata serta melakukan pengelolaan aset desa sebagai objek wisata.

Kelembagaan juga berperan mendistribusikan manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata. Pendapatan yang diterima dari hasil pariwisata di Desa Wisata Lamajang terutama yang berasal dari BUMDES dibagi kepada beberapa pihak dengan sekema pembagian pendapatan untuk pemerintah desa, PLTA untuk lahan yang dimiliki oleh PLN, dan pelaku wisata dimana persentasenya disepakati oleh semua pihak.

Dalam melakukan distribusi manfaat, pemerintah desa mempergunakan pendapatan yang diterima dari hasil desa wisata untuk melakukan pembangunan desa, baik itu berupa pembangunan infrastruktur desa maupun sarana-prasarana lainnya.

Kelembagaan dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi pariwisata. Sejalan dengan pendapat tersebut, pemerintah desa wisata Lamajang berperan dalam memfasilitasi pengelolaan desa wisata dengan membentuk Badan Pengelola Desa wisata, selain itu memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak swasta yang ingin melakukan investasi, serta memfasilitasi berbagai kegiatan pelatihan baik yang berasal dari pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak-pihak lain dengan menyediakan sarana-prasarana pendukung pelatihan.

Pemerintah desa juga berperan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata, Pengembangan partisipasi masyarakat dilakukan pemerintah desa Lamajang dengan memberikan kebebasan bagi warga masyarakat yang ingin menjadi pelaku wisata seperti menjadi pemilik *homestay* maupun mengikuti berbagai kegiatan penyediaan wisata dengan catatan telah melakukan koordinasi dengan pihak Badan pengelola desa wisata.

b. Badan Pengelola Desa Wisata

Badan pengelola desa wisata sebagai badan pengeola pariwisata salah satu perannya melakukan pengaturan sumber daya dengan merekrut para warga masyarakat yang ingin turut serta menjadi pelaku wisata baik berupa pelaku secara langsung seperti pemilik *homestay* ataupun mengumpulkan warga masyarakat yang ingin lahan pertanian atau perkebunannya dijadikan *spot* wisata oleh wisatawan. Sedangkan dalam pengaturan sumber daya alam, badan pengelola desa wisata juga berperan dalam menggali potensi-potensi alam desa Lamajang yang bisa dijadikan *spot* wisata baru.

Badan pengelola desa wisata juga memiliki peran mendistribusikan manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata, distribusi pendapatan yang dilakukan oleh Badan pengelola desa wisata lebih kepada masyarakat yang menjadi pelaku wisata pemilik lahan yang digunakan menjadi spot wisata. Distribusi pendapatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak badan pengelola desa wisata dilaksanakan sesuai kesepakatan semua pihak. Pendapatan dari desa wisata oleh badan pengelola desa wisata juga digunakan untuk mengembangkan kesenian yang ada di desa wisata tersebut sebagai potensi wisata andalan, karena Desa Wisata Lamajang juga mengusung konsep wisata budaya.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Desa Wisata dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan yaitu dengan mengajak serta masyarakat untuk terlibat dalam setiap event wisatawan yang ada seperti menjadi petugas keamanan apabila ada kegiatan wisatawan yang berskala besar, menjadi pengelola dan pemandu wisata serta mengajak para petani untuk menyewakan lahan pertanian mereka untuk dijadikan *spot* wisata.

Dampak Pengembangan Desa Wisata Lamajang Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal

Pariwisata sebagai suatu industri memberikan dampak terhadap ekonomi baik untuk masyarakat lokal, daerah, maupun untuk negara, Sejalan hal tersebut, pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lamajang diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat yaitu pendapatan masyarakat lokal terutama yang menjadi pelaku wisata mengalami peningkatan, diversifikasi pekerjaan dikalangan warga masyarakat yakni warga masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, memiliki sumber pendapatan lain selain dari hasil pertanian, misalnya sebagai pemilik *homestay*, pemandu wisata, dan pengelola objek wisata.

Adanya Desa Wisata juga mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha yang menunjang kegiatan wisata seperti pembangunan rumah untuk *homestay*, warung makan, kios

di objek wisata. Adanya wisatawan yang berkunjung dan melaksanakan aktivitas di Desa Wisata Lamajang membuat masyarakat lokal berinisiatif untuk membuka usaha yang terkait dengan pariwisata. Beberapa usaha terkait dengan pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat berupa *homestay*, warung makan, kios cendramata, warung jajanan.

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lamajang secara keseluruhan belum membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat setempat hal tersebut karena kondisi desa wisata yang masih dalam tahap rintisan, namun demikian bahwa masyarakat sebenarnya sudah mengetahui terkait dampak pariwisata dari adanya kunjungan wisatawan ke tempat-tempat yang menjadi daya tarik wisata di desa lamajang seperti Fajar Alam, Bukit Eon, dan Kampung Cikondang.

Hal yang menjadi kendala adalah disebabkan kurangnya sinergitas antara badan pengelola desa wisata dengan lembaga-lembaga desa yang ada dibawah pemerintah desa seperti PKK, LMDH serta kegiatan kepariwisataan ini juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan dalam setiap aspek pengelolaan Desa Wisata Lamajang, manfaat ekonomi pariwisata berupa tambahan pendapatan, peluang kerja dan usaha baru dapat terdistribusi secara merata kepada setiap lapisan masyarakat. Dengan begitu masyarakat mendukung penuh pengembangan desa wisata karena model pengelolaan berbasis masyarakat tersebut membawa dampak ekonomi yang positif dan dapat dirasakan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, secara umum penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa peran kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Lamajang telah memiliki kapasitas yang baik, kapasitas organisasi maupun kapasitas individu. Kapasitas organisasi tidak akan berjalan secara efektif apabila kapasitas individu tidak memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, sebaliknya kapasitas individu tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak didukung dengan kapasitas organisasi.

1. Kapasitas organisasi yang dilihat dari kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan oleh bapak Dani sebagai koordinator lapangan dan pimpinan Badan Pengelola Desa Wisata Lamajang menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pengelola Desa Wisata Lamajang kurang baik karena adanya ketergantungan terhadap pemimpin organisasi dan adanya permasalahan pada aspek koordinasi. Pada aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan atraksi wisata serta aspek promosi desa wisata, organisasi pengelola Desa Wisata Lamajang telah menunjukkan kapasitas yang baik.
2. Pada tingkat individu, Desa Wisata Lamajang telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata. Selain itu individu menunjukkan kapasitas yang cukup baik dalam pengelolaan atraksi wisata, pengelolaan cinderamata, serta pelayanan wisatawan. Namun individu belum menunjukkan kapasitas yang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata.
3. Lembaga desa memiliki peran yang besar dalam pengembangan Desa Wisata Lamajang. Dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lamajang, lembaga desa memegang peranan sentral yaitu: pemerintah desa melakukan pengaturan sumber daya dengan membentuk Badan Pengelola Desa Wisata; melakukan distribusi manfaat, pemerintah desa mempergunakan pendapatan yang diterima dari hasil desa wisata untuk melakukan pembangunan desa; memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak swasta yang ingin melakukan investasi; mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga bisa turut serta menjadi pelaku wisata dan Badan Pengelola Desa Wisata merekrut para warga masyarakat yang ingin turut serta menjadi pelaku wisata; mengadakan pelatihan kepada para pelaku wisata;

mengembangkan kesenian yang ada di desa wisata; Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata dengan mengajak serta masyarakat untuk terlibat dalam setiap event wisatawan.

4. Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lamajang secara keseluruhan belum membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat setempat hal tersebut karena kondisi desa wisata yang masih dalam tahap rintisan, hal yang menjadi kendala adalah disebabkan kurangnya sinergitas antara badan pengelola desa wisata dengan lembaga-lembaga desa yang ada dibawah pemerintah desa seperti PKK, LMDH serta kegiatan kepariwisataan ini juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.

SARAN

Pemerintah dan pengelola Desa wisata perlu pengaplikasian konsep desa wisata terpadu. Desa Wisata terpadu yang diharapkan yakni mengintegrasikan potensi wisata alam, potensi wisata budaya, serta potensi desa seperti *homestay* dan cinderamata. Hal yang dapat dilakukan antara lain :

1. kerjasama antara pemerintah desa, badan pengelola desa wisata dan kelompok seni dalam menyediakan kegiatan wisata Desa Lamajang. Apabila wisata yang ditawarkan semakin banyak, maka paket wisata menginap dapat dilaksanakan dan *homestay* dapat digunakan. Selain itu semakin lama wisatawan berada di Desa Wisata Lamajang, semakin meningkatkan minat wisatawan terhadap produk wisata yang ada di Desa Wisata Lamajang.
2. Agar dampak pengembangan pariwisata dapat di rasakan oleh masyarakat perlunya perbaikan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana, seperti kualitas jalan, papan informasi jalan, rambu-rambu, area parkir, serta keberadaan *home stay* yang harus lebih menonjolkan budaya Sunda. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai dalam hal melayani wisatawan dengan memberikan pelatihan mengenai kepariwisataan, peningkatan promosi Desa Wisata Lamajang melalui media sosial dan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, Sukma & Antara. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Chaskin, R. (2001). *Building community capacity*. New York: Walter de Gruyter.
- Damayanti, E. (2014). Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 464-470.
- Djogo, T., Sunaryo, S. D., & Sirait, M. (2003). Kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan agroforestri *Bahan ajaran agroforestri 8*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.
- Gunawan, Anita Sulistiyaning, dkk. (2016). Analisis Pengembangan Pariwisata terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Bisnis, (JAB) Vol. 32 No. 1*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*: Van Nostrand Reinhold.
- Kapucu, N., Healy, B. F., & Arslan, T. (2011). Survival of the fittest: Capacity building for small nonprofit organizations. *Evaluation and Program Planning*, 34(3), 236-245. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2011.03.005>

- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muallisin, Isnaini. (2007). Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta*, No. 2, Desember 2007, pp.5-15.
- Pendit, S. Nyoman. (2012). *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana - Edisi 2*. Jakarta: PT Prandnya Paramita.
- Sastrayuda, G. S. (2010). *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Timothy, D. J. (1999). Participatory planning: A view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371-391.
- Triambodo, S., & Damanik, J. (2015). *Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY)*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- UNDP. (1997). Capacity Development. *Manajemen Development and Governance Division*. Technical Advisory Paper No. 2.